
Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya

Siti Nurlaili Triwahyuni^{1*}, Fadjrin Wira Perdana², Bambang Setiawan³, Irwan⁴,
Yohan Wibisono⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4,5}

Universitas Diponegoro, Indonesia²

Email: elly.thecullens@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com²,

bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id³, irwanpasang07@gmail.com⁴,

yohanwibisono.32@gmail.com⁵

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 15-11-2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 10-12-2021

Disetujui : 15-12-2021

Kata Kunci: konflik;
diplomasi; implementasi

Keywords: *conflict;*
diplomacy; implementation

Abstrak

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Penderitaan suku Muslim Rohingya ini tentu berimplikasi pada situasi keamanan regional Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Konflik terkait isu kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar (*state branding*) untuk membangun image sebuah Negara. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yakni pengajuan proposal kemanusiaan dan usulan formula 4+1 bagi masyarakat rohingya dimasa depan.

Abstract

The Myanmar government's internal conflict with the Rohingya Muslim tribe is one of the many forms of a deadly and heartbreaking tragedy. The suffering of the Rohingya Muslim tribe certainly has implications for the regional security situation in Southeast Asia. This study aims to determine how the implementation of the principle of a free and active foreign policy in Indonesia's diplomatic efforts to overcome the Rohingya conflict in Myanmar. The conflict related to humanitarian issues in Myanmar that afflicts the Rohingya ethnic group has attracted the concern of the international community as well as the Indonesian people. In the implementation of foreign policy, diplomacy can be a bargaining point (state branding) to build the image of a country. Successful diplomacy requires effective negotiation. The qualitative approach used in this research is a type of literature study whose data sources are analyzed from books and journals related to research into the Indonesian government's diplomatic efforts in mediating humanitarian conflicts in Myanmar. The findings of this study indicate that there are several diplomatic strategies carried out by Indonesia in the issue of the Rohingya ethnic conflict with the Myanmar government, namely the submission of humanitarian proposals and the proposed 4+1 formula for the Rohingya community in the future.

Koresponden author: Siti Nurlaili Triwahyuni

Email: elly.thecullens@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang majemuk, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya etnis yang tinggal di Myanmar, bahkan “Burma” yang sebelumnya merupakan nama negara sebelum Myanmar diambil dari salah satu etnis mayoritas di sana. Tercatat Myanmar memiliki hamper 135 etnis yang tercatat oleh undang-undang (UU) yang berisi tentang etnis yang diakui oleh pemerintah, di antara lain adalah: Burmanese, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan sebagainya ([Susetyo et al., 2013](#)).

Adapun etnis-etnis yang berada di Myanmar, terdapat etnis Rohingya yang merupakan etnis yang berbeda dari kebanyakan etnis di Myanmar dikarenakan etnis Rohingya beragama Islam, penampilan fisik cenderung mirip dengan penduduk Asia Selatan sedangkan etnis lain di Myanmar beragama Buddha. Selama ini pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai warga ilegal yang bertempat tinggal di Arakan (sekarang Rakhine). Hal tersebut sesuai dengan UU kewarganegaraan 1982 di Myanmar, di dalam UU tersebut disebutkan bahwa etnis yang diakui oleh negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris pada 1824 dan etnis Burmese Chinese, Panthay, Burmese Indians, Anglo-Burmese, Gurkha, dan Rohingya tidak diakui ([Zulfani, 2019](#)).

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di dunia. Salah satu laporan dari MSF (*Medecins Sans Frontieres*), yakni sebuah lembaga yang beranggotakan para Aktivis Kemanusiaan Dokter Lintas Batas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 saja sekitar 647.000 etnis Rohingya mengungsi ke negara Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari persekusi yang dilakukan oleh militer Myanmar dan sekitar 6.700 orang meninggal dunia dalam konflik berdarah ini. Sebanyak 6.700 yang meninggal, 69,4% meninggal karena ditembak, 8,8% meninggal karena dibakar, 5% meninggal karena dipukuli, 2,6% meninggal setelah kekerasan seksual, dan sisanya ada yang meninggal karena disembelih lehernya dan diculik ([Sundari et al., 2021](#)).

Konflik Rohingya bersifat multidimensi yang dimulai sejak awal kemerdekaan Myanmar dan berlanjut pada 1978 di masa Junta Militer Myanmar, akibatnya 200.000 orang mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Hal tersebut juga berlanjut pada 1991 dan menyebabkan 250.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh.³ Intimidasi dan diskriminasi tidak hanya berasal dari pemerintah Myanmar, namun juga dari kelompok anti Islam dari kalangan masyarakat Budha ekstremis. Etnis Rohingya sebagai etnis yang berbeda, beragama Islam, dan tidak diakui kerap mengalami diskriminasi, dan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, etnis Rohingya mendapatkan predikat dari PBB sebagai *the most persecuted minority* dan mendapatkan label sebagai *the Gypsies of Asia* ([Singh, 2014](#)).

Konflik Rohingya kembali mencuat pada 2012 dan 2015 ketika etnis Rohingya mulai pergi dari Myanmar karena diskriminasi yang terjadi di Myanmar. Khususnya pada Maret 2015,

Myanmar mencabut kartu identitas penduduk yang disebut “kartu putih” bagi orang yang tinggal di Myanmar, namun tanpa mendapatkan status sebagai warga negara Myanmar atau warga negara asing, hal ini yang membuat etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar ([Muhamad](#), 2015).

Eskalasi konflik terjadi pada 2016 ketika *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang pos polisi dan menewaskan 9 orang. Sejak itu tentara Myanmar melakukan tindakan represif terhadap “teroris Rohingya”. Semenjak itu, terjadi bentrokan antara militer Myanmar dengan etnis Rohingya hingga menimbulkan korban jiwa. Pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban dari bentrokan militer dan etnis Rohingya di Maungdaw, Rakhine telah mencapai 86 orang terdiri dari 17 tentara dan 69 etnis Rohingya. Namun menurut kelompok Rohingya sendiri, bentrokan itu sudah menelan lebih dari 400 nyawa ([Zulfani](#), 2019).

Banyaknya korban jiwa yang tercatat oleh TPF PBB mencapai 10.000 dan pengungsi yang mencapai 1 juta orang yang di antaranya 741.014 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh Hal tersebut membuat konflik Rohingya menjadi perhatian dunia yang ditandai dengan berbagai respons dari aktor internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional seperti Malaysia dan PBB. Malaysia dan PBB menggunakan *megaphone diplomacy* atau diplomasi pengeras suara terkait konflik Rohingya ([Portal](#), 2021). Diplomasi adalah suatu praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui perwakilan resmi yang meliputi seluruh proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Sejatinnya diplomasi adalah usaha untuk menyakinkan pihak atau negara lain untuk dapat memahami pandangan dan membenarkan perspektif kita tanpa perlu menggunakan kekerasan. Sebagai salah satu alat utama yang digunakan negara dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar (*state branding*) untuk membangun image sebuah Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya berfokus kepada penjelasan dalam kata-kata. John Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada gambaran holistik terkait isu yang spesifik dan dibentuk dengan kata-kata dalam sebuah latar ilmiah ([Creswell & Creswell](#), 2017).

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran proses dari waktu ke waktu dan menafsirkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan isu terkait ([Nugrahani & Hum](#), 2014). Mengenai penelitian ini akan mencoba menjelaskan alasan Myanmar menerima diplomasi 25 Indonesia terkait konflik Rohingya periode 2015-2017 dengan menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan diplomasi bagi Negara adalah guna mengamankan integritas politik, territorial dan menjaga kepentingan dan keamanan nasional ([Fadli](#), 2016). Fungsi utama pelaksanaan diplomasi melahirkan negosiasi dengan menyelesaikan perbedaan serta menjamin kepentingan Negara melalui sarana dan efektivitas negosiasi yang tepat sebagai ruang lingkungannya.

Diplomasi merupakan konsep yang menciptakan negosiasi sebagai praktiknya. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif, apabila negosiasi gagal maka dampaknya berupa terciptanya konflik/perang yang juga merupakan bagian dari sarana diplomasi. Karena dalam sejarahnya Prinsip fundamental dari realisme klasik adalah hubungan internasional terpisah dari pandangan politik dalam negeri. Oleh karena itu proses politik internasional dapat bersifat anarkis (Dugis, 2016).

Terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi negara yaitu Persuaian, Kerjasama dan Pertentangan. Menurut (Prayuda, 2019) Diplomasi mencakup lima hal yang berbeda namun signifikan yaitu Politik Luar Negeri, Negosiasi, Mekanisme Negosiasi, Interpretasi Keahlian Seseorang yang melakukan negosiasi, dan Tujuan Negosiasi.

Menurut (Hennida, 2009) Diplomasi secara umum terbagi dua, yaitu:

- a. *Soft Diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang ekonomi, budaya, bahasa dan persahabatan. Cara ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, melihat banyak negara yang lebih senang memahami budaya asing. Biasanya *soft diplomacy* ini tendensinya melakukan pendekatan dengan mengikuti perundingan bilateral seperti diplomasi publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sikap, institusi dan kebijakan yang tepat untuk diambil oleh negaranya atau dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan menyertakan pihak ketiga sebagai penengah yaitu Mahkamah Internasional.
- b. *Hard Diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan dalam bentuk memamerkan kekuatan militernya dengan cara seperti agresi militer atau dalam bentuk yang lebih ekstrim yaitu "Perang". Negara juga dapat terlibat kerja sama pertahanan dengan negara lain yang gunanya untuk meningkatkan efektivitas serta efek *deterrence* apabila terjadi konflik.

Menurut (Badaruddin, 2020), terdapat pola-pola diplomasi yaitu:

- a. Diplomasi Bilateral yang diartikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam membahas apa yang menjadi kepentingan nasional. Biasanya dalam diplomasi ini, terdapat prinsip hubungan timbal balik, jadi ketika suatu negara membutuhkan bantuan, maka di lain hari ia juga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh negara lain. Namun terkadang terdapat *balance of power* dimana terdapat ketimpangan antara negara lemah dan negara kuat dalam melakukan diplomasi tersebut.
- b. Diplomasi Multilateral, yaitu interaksi antara tiga atau lebih negara yang memiliki *common interest and common goals*. Biasanya diplomasi ini dilakukan secara terbuka dan melalui negosiasi agar mendapat kepercayaan lebih dari lingkungan internasional. Keunggulan lain dari diplomasi multilateral adalah kemungkinan terciptanya kebijakan yang mendapatkan legitimasi kuat karena mengikutsertakan banyak negara.
- c. Diplomasi Personal, yaitu diplomasi yang dilakukan seperti melakukan kunjungan kepresidenan ke negara lain atas urusan negara maupun pribadi diluar pekerjaan sebagai diplomat dan organ politik namun pemikirannya dapat mempengaruhi *insting* personal negara yang dikunjungi.
- d. *Summit Diplomacy*, yaitu jenis diplomasi konferensi yang digunakan oleh *global governance* dimana kepala negara bertemu tatap muka untuk bernegosiasi secara langsung. Misalnya kehadiran negara berdaulat dan memiliki kekuatan dalam pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Diplomasi ini biasanya bersifat tingkat tinggi.

- e. Diplomasi Asosiasi, yaitu diplomasi yang dilakukan karena adanya kesamaan kepentingan nasional dengan negara yang menjalin hubungan diplomasi bersama. biasanya pola ini membentuk sebuah organisasi yang memberikan pengaruh terhadap sistem dan tatanan politik global dan regional serta didalamnya membahas isu-isu mengenai permasalahan yang terjadi. Contohnya ialah ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang merupakan organisasi Asia Tenggara dengan tujuan membangun institusi regional sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan memperkuat solidaritas kawasan *regional*.
- f. Diplomasi Konferensi, yaitu diplomasi yang menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berkumpul dalam satu pertemuan dan konferensi untuk membahas mengenai isu-isu serta mencari dan menyepakati solusi demi penyelesaian konflik atau kesenjangan tersebut. Pola ini lebih menekankan komunikasi secara lisan atau dengan cara *face-to-face*. Hasil dari diplomasi konferensi akan berjalan dengan efektif hanya jika mencapai konsensus.

1. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Mengatasi Konflik Rohingya

Konflik terkait isu kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang juga berpengaruh di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah melakukan aksi strategis untuk membantu penanganan konflik di negara Myanmar. Upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan kompleksitas dan keterlibatan banyak pihak. Menariknya, masyarakat Indonesia menilai isu Rohingya merupakan isu agama ([Mahmood et al., 2017](#)). Meski tidak sepenuhnya salah, reduksi konflik mengarah pada permasalahan agama sama sekali tidak tepat. Meski demikian, Kepedulian Indonesia dalam misi diplomasinya membantu penyelesaian konflik di Myanmar dengan paradigma kemanusiaan yang universal bukan terkotak dalam identitas tertentu. Selama ini Indonesia telah mengupayakan usaha untuk turut menyelesaikan konflik Rohingya namun selalu saja terkendala pada prinsip non-intervensi. Sakralitas prinsip ini sepenuhnya di pegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN, sebab prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Namun, tentu saja perlu adanya rasa kepedulian terlebih apabila terjadi isu kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dinilai cukup berat. Dilema ini disadari oleh negara Indonesia, untuk itu pemerintah akhirnya turut membantu menyelesaikan konflik dengan menempuh jalur diplomasi ([Rosyid, 2019](#)).

Terdapat 3 *track* (jalur) diplomasi yang telah ditempuh sejauh dengan realitas yang ada bagi Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus, yaitu pertama, Pemerintah sebagai aktor pencipta perdamaian melalui diplomasi. Level diplomasi dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis terutama dalam kasus *high politics* karena biasanya dalam perumusan diperlukan adanya *power*. Asumsi dasar diplomasi dalam skala internasional adalah *relative power* yang artinya Politik disuatu negara (Indonesia) harus mampu mengontrol, mengintervensi bahkan mempengaruhi negara lain.

Dalam hal ini, diplomasi Indonesia dalam menangani konflik di Myanmar terkait etnis Rohingya adalah:

- a. Indonesia melakukan pendekatan secara personal terhadap pemerintahan Myanmar dengan pola diplomasi *Government to Government* dengan usulan agar Pemerintah Myanmar secepatnya menyelesaikan konflik etnis tanpa diskriminasi. Karena sejatinya, konflik tersebut telah termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

- b. Indonesia terus mendorong keterlibatan ASEAN sebagai komunitas regional atas keberadaannya di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam upaya menyelesaikan konflik.
- c. Mendirikan *Kamp-Kamp* bagi pengungsi Rohingya, serta memberikan hibah untuk membantu repartiasi pengungsi.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi Rohingya dari bantuan teknis dan psikis yaitu:
 - 1) Membantu pemenuhan bahan makanan dan penampungan sementara pengungsi Rohingya, Myanmar di Aceh pada tahun 2009.
 - 2) Menampung 63 pengungsi di Aceh Timur dan 121 pengungsi di Lhoksumawe pada tahun 2013.
 - 3) Bersama UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*) menyediakan obat, penampungan, dan pangan bagi 1.345 warga Rohingya serta membangun sarana pendidikan bagi remaja dan anak-anak senilai 1 juta Dollar USA di Rakhine pada tahun 2015.
 - 4) Mengirim 115 Ton makanan, selimut, dan sarung bagi Masyarakat pada 2016.
 - 5) Rencana pembagunan IHC/Indonesia *Health Center*, di desa Myaung Bywe.
 - 6) Disela-sela KTT/Konferensi Tingkat Tinggi pada April 2017 di Manila. Presiden Indonesia melakukan penyampaiannya dalam komitmen Indonesia membantu Myanmar dalam program kerjasama inklusif yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi bersama AKIM/Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar dalam program HASCO/*Humanitarian Assistance for Sustainable Community*

Kedua, aktor diplomasi bukan hanya negara akan tetapi juga *non*-negara atau organisasi yang juga sebagai pencipta perdamaian dan resolusi konflik melalui diplomasi. Tujuan dari jalur kedua ini adalah membantu upaya penyelesaian dengan meningkatkan pemahaman komunikasi dan kolaborasi. Dengan begitu aktor *non*-negara mampu mengetahui akar permasalahan dan dapat mengeksplor *problem solving* secara kompleks tanpa adanya keberpihakan dari negara manapun. Indonesia ikut berperan dalam meredakan konflik yang terjadi di Myanmar dengan mengutus representatif yaitu menteri luar negeri untuk menemui Aung Sang Suu Kyi untuk menyampaikan amanah masyarakat Indonesia dalam pengajuan Proposal Kemanusiaan masyarakat Rohingya dimasa depan yakni dengan kebijakan:

- a. Pengembalian status stabilitas dan keamanan internal kawasan.
- b. Perlindungan kepada seluruh masyarakat terutama di Rakhine tanpa keberpihakan dan memandang ras,
- c. Membuka akses kemanusiaan.
- d. Menyepakati bahwa Indonesia beserta ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka implementasi diplomasi Indonesia melalui kebijakan luar negeri bebas aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar dilaksanakan baik oleh *actor* Negara yang secara formal direpresentasikan oleh Kementerian Luar Negeri, maupun dilaksanakan oleh *actor non* negara yaitu organisasi yang juga sebagai pencipta perdamaian dan resolusi konflik melalui diplomasi. Sinergitas dua *actor* diplomasi Indonesia tersebut diharapkan dapat secara efektif dapat mengatasi konflik Rohingya di Myanmar.

Bibliografi

- Badaruddin, M. (2020). *Signifikansi Energi dalam Dinamika Geopolitik di Timur Tengah*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dugis, V. (2016). Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik. *Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS)*.
- Fadli, F. (2016). *Film The Radi I Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan*. Univeristas Andalas.
- Hennida, C. (2009). Diplomasi publik dalam politik luar negeri. *Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22(1), 17–23.
- Mahmood, S. S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. *The Lancet*, 389(10081), 1841–1850. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00646-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00646-2)
- Muhamad, S. V. (2015). Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 7(10), 5–8.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*.
- Portal, U. O. (2021). Refugee Response in Bangladesh. *The Author Verified This Estimated Data from Information Collected by Two Different Non-Governmental Organizations—Mukti Cox's Bazar and Care-Bangladesh—and a Concerned Government Official Who Preferred to Remain Anonymous*.
- Prayuda, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 80–93. [https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(01\).4429](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429)
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613–635. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Singh, B. (2014). *Tantangan orang Rohingya Myanmar: menghadapi satu minoritas teraniaya dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional*. Gadjah Mada University Press.
- Sundari, R., Prayuda, R., & Sary, D. V. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar. *Jurnal Niara*, 14(1), 177–187. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011>
- Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, R. M. (2013). Rohingya Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara. *Jakarta: PAHAM Indonesia*.
- Zulfani, A. (2019). *Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017*. FISIP UIN Jakarta.